



## Hubungan *Ability To Pay* dan *Willingness To Pay* dengan Kepatuhan Membayar Iuran Peserta BPJS Non PBI di Kecamatan Batang Kuis

Riska Ananda<sup>1\*</sup>, Fhidiana Sari<sup>2</sup>, Fitriani Pramita Gurning<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup> Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: [riskaananda1520@gmail.com](mailto:riskaananda1520@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [fhidianasarii@gmail.com](mailto:fhidianasarii@gmail.com)<sup>2</sup>,

[fitrianiurning@uinsu.ac.id](mailto:fitrianiurning@uinsu.ac.id)<sup>3</sup>

Korespodensi email: [riskaananda1520@gmail.com](mailto:riskaananda1520@gmail.com)

**Abstract.** Income factors and the number of dependents in the family have a great influence on the ability to pay, Measurement of the level of ability to pay and willingness to pay (ATP-WTP) is very important to do because it is a factor that affects people in participating in health insurance. Purpose: This study aims to find out the ability, willingness, public relations of Ability to Pay and Willingness to Pay with compliance with paying contributions of non-PBI BPJS participants in Batang Kuis District. Methods: The type of research used in this study is a quantitative research with a correlation research design that aims to identify the relationship between ability to pay and willingness to pay to the compliance with paying contributions of Non-PBI BPJS participants at the Batang Kuis Health Center. Results: This study found a significant relationship between Ability to Pay (ATP) and Willingness to Pay (WTP) with compliance with paying Non-PBI BPJS contributions, with WTP having a more dominant influence. Participants who have a high willingness to pay tend to be more compliant even though their economic ability is not always high, demonstrating the importance of psychological factors such as awareness and motivation in compliance. Conclusion: In general, this study can be concluded that both factors have a significant influence on the level of compliance of participants. Participants who have a good ability to pay (ATP) tend to be more compliant in fulfilling their BPJS contribution payment obligations, because they are economically able to provide the necessary funds.

**Kata Kunci:** Ability to pay, Willingness to Pay, BPJS, Non PBI

**Abstrak.** Faktor penghasilan dan banyaknya tanggungan dalam keluarga sangat berpengaruh pada kemampuan membayar (Ability to pay), Pengukuran terhadap tingkat kemampuan membayar dan kemauan membayar (ATP-WTP) sangat penting untuk dilakukan karena merupakan faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam mengikuti jaminan kesehatan. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan, kemauan, hubungan masyarakat Ability to Pay dan Willingness to Pay dengan kepatuhan membayar iuran peserta BPJS non PBI di Kecamatan Batang Kuis. Metode: Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian korelasi yang bertujuan mengidentifikasi hubungan antara ability to pay dan willingness to pay terhadap kepatuhan membayar iuran peserta BPJS Non PBI di Puskesmas Batang Kuis. Hasil: Penelitian ini menemukan hubungan signifikan antara Ability to Pay (ATP) dan Willingness to Pay (WTP) dengan kepatuhan membayar iuran BPJS Non PBI, dengan WTP memiliki pengaruh lebih dominan. Peserta yang memiliki kemauan membayar tinggi cenderung lebih patuh meskipun kemampuan ekonominya tidak selalu tinggi, menunjukkan pentingnya faktor psikologis seperti kesadaran dan motivasi dalam kepatuhan. Kesimpulan: Penelitian ini secara umum, dapat disimpulkan bahwa kedua faktor tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan peserta. Peserta yang memiliki kemampuan membayar (ATP) yang baik cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pembayaran iuran BPJS, karena mereka secara ekonomi mampu menyediakan dana yang diperlukan.

**Kata Kunci:** Ability to pay, Willingness to Pay, BPJS, Non PBI

### 1. PENDAHULUAN

Upaya penyelenggaraan universal health coverage (UHC) tertuang dalam amanat Pasal 28H (1), Pasal 28H (3) dan Pasal 34 (2) UUD 1945, yang secara khusus merujuk pada hak atas pelayanan kesehatan, hak atas jaminan jaminan sosial dan komitmen negara untuk membangun jaminan sosial bagi seluruh warga negara. Inisiatif ini kemudian diimplementasikan dalam UU No. 40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

(SJSN) pada tahun 2004. UU SJSN menjamin setiap orang memiliki hak yang sama atas pelayanan kesehatan yang komprehensif, aman, bermutu, dan terjangkau melalui Jaminan Kesehatan (JKN) sejak tahun 2014. Pelaksanaan program JKN semakin diperkuat melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022. Dimana Inpres ini memuat upaya pelaksanaan program JKN terhadap masing-masing Kementerian/Lembaga. Sehingga, melalui Inpres ini optimalisasi JKN diharapkan dapat diwujudkan lebih cepat melalui setiap program kerja kelembagaan pemerintah (Kasim et al., 2023).

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2023 jumlah penduduk di Kabupaten Deli Serdang mencapai 1.953.986 jiwa. Kabupaten Deli Serdang terdiri dari 22 kecamatan, termasuk diantaranya adalah Kecamatan Batang Kuis. Dalam menjalankan BPJS Kesehatan bagi masyarakat Indonesia telah ditetapkan pada tanggal 1 Januari 2014 Jaminan Kesehatan Sosial Nasional diberikan kepada seluruh masyarakat. Jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan menurut jenis jaminan BPJS kesehatan non Penerima Bantuan Iuran (PBI) terdapat 27,87%. Dari data BPS (Badan Pusat Statistik) tersebut dapat diketahui bahwa jumlah peserta non PBI adalah 544.419 jiwa. Salah satu tujuan sistem jaminan sosial kesehatan adalah untuk memberikan jaminan kepada masyarakat agar kebutuhan hidup dapat terpenuhi dan layak bagi masyarakat (Rusydi et al., 2022).

Prinsip pelaksanaan BPJS yaitu gotong royong, kepesertaan yang diwajibkan, iuran yang sesuai dengan persentase penghasilan serta bersifat nirlaba dan amanah. Iuran kesehatan merupakan salah satu iuran yang diharuskan bagi masyarakat Jaminan Kesehatan. Masyarakat diwajibkan membayar iuran dengan syarat yang telah berlaku. Iuran yang terdapat pada jaminan kesehatan adalah anggaran yang diwajibkan untuk dibayarkan secara rutin oleh masyarakat serta pemerintah. Masyarakat yang tergolong PBI (Peserta Bantuan Iuran) yang dibayarkan oleh pemerintah, adapun Non PBI adalah masyarakat yang memiliki penghasilan yang biaya iurannya dibayar secara mandiri. Peserta Non PBI merupakan peserta mandiri yang penghasilannya didapat dari usaha sendiri sehingga ketika mereka mengikuti kepesertaan BPJS diwajibkan membayar iuran setiap bulannya (Rusydi et al., 2022).

Sistem kepesertaan ataupun pembayaran peserta BPJS non PBI bagi pekerja sektor informal tidak bersifat memaksa dan didasari oleh kesadaran pribadi sehingga masyarakat memiliki pilihan untuk berpartisipasi atau tidak dalam JKN, padahal dampak positif atau keuntungan bagi yang bersangkutan jika mengikuti program JKN adalah

terlindunginya dari biaya kesehatan atas resiko sakit yang semakin tinggi. Kurangnya minat dan kesadaran peserta BPJS non PBI untuk mengikuti program JKN dan membayar iuran dipengaruhi oleh banyak faktor. Menurut Hildayanti, kemampuan membayar (ATP) dan kemauan membayar (WTP) menjadi salah satu faktor diantaranya (Iqbal et al., 2023).

Kemampuan dalam membayarkan anggaran jaminan kesehatan sangat berpengaruh kepada tingkat penghasilan seseorang. Faktor penghasilan dan banyaknya tanggungan dalam keluarga sangat berpengaruh pada kemampuan membayar (Ability to pay). Setiap orang berbeda-beda ada yang kemampuan untuk membayar iuran sangat besar akan tetapi tidak ingin membayar pelayanan kesehatan dalam artian kemauan untuk membayar lebih kecil dari kemampuan. Adapula orang yang kemampuan untuk membayar iuran lebih rendah tetapi rutin untuk membayar pelayanan kesehatan dalam artian kemauan membayar lebih besar dari kemampuan. Pengukuran terhadap tingkat kemampuan membayar dan kemauan membayar (ATP-WTP) sangat penting untuk dilakukan karena merupakan faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam mengikuti jaminan kesehatan (Rusydi et al., 2022).

ATP dan WTP merupakan faktor kunci dalam keputusan peserta untuk membayar iuran JKN. ATP mengacu pada kemampuan finansial seseorang untuk menanggung biaya premi asuransi kesehatan, sedangkan WTP mencerminkan seberapa besar keinginan seseorang untuk membayar iuran tersebut. Dalam konteks kepesertaan JKN, ATP dan WTP berperan penting dalam menentukan keikutsertaan peserta, tingkat kepatuhan membayar iuran, dan pada akhirnya aksesibilitas terhadap fasilitas kesehatan yang diterima (Agustina et al., 2021).

Kemampuan membayar anggaran asuransi kesehatan sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan seseorang. Situasi ekonomi dan kebutuhan anggota keluarga berperan penting dalam menentukan kelancaran pembayaran (ATP) (Dewiyani et al., 2022). Setiap individu berbeda, ada yang memiliki kemampuan finansial yang tinggi untuk membayar iuran namun enggan melakukannya, yang mengindikasikan kesediaan untuk membayar kurang dari kemampuan mereka. Bersamaan dengan itu, ada pula individu yang memiliki kemampuan finansial yang terbatas namun secara teratur membayar iuran kesehatan, yang mengindikasikan bahwa mereka cenderung membayar lebih banyak dari yang mereka mampu (Rusydi et al., 2022).

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian cross sectional yang bertujuan mengidentifikasi hubungan antara ability to pay dan willingness to pay terhadap kepatuhan membayar iuran peserta BPJS Non PBI di Puskesmas Batang Kuis. Kemudian, teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik simple random sampling. Dengan cara membagikan kuesioner secara random kepada masyarakat pengguna BPJS non PBI yang ada di Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Puskesmas Batang Kuis, Jalan Pancasila No.26 Bakaran Batu, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Sasaran dari penelitian ini adalah masyarakat pengguna BPJS non PBI yang ada di Kecamatan Batang Kuis. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara ATP dan WTP terhadap kepatuhan masyarakat membayar iuran BPJS non PBI di Kecamatan Batang Kuis.

Populasi peserta BPJS Non PBI yang ada di Kabupaten Deli Serdang berjumlah 544.419 jiwa. Di kecamatan batang kuis populasi penduduk mencapai 6427. Namun, belum diketahui dengan pasti jumlah peserta pengguna BPJS Non PBI di Kecamatan Batang Kuis. Maka sampel dipilih menggunakan Metode 1. Probability Sampling, yaitu Teknik Simple Random Sampling dengan pertimbangan bahwa populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat umum pengguna BPJS non PBI. Seperti yang telah diketahui apabila jumlah populasi belum diketahui dengan pasti, maka dapat ditentukan menggunakan rumus Lameshow seperti berikut:

$$n = \frac{Z^2 \cdot p \cdot (1-p)}{d^2}$$
$$n = \frac{1,96^2 \cdot 0,5 \cdot (1-0,5)}{0,5^2 + (1,96^2 \cdot 0,5 \cdot (1-0,5))}$$
$$n = 237$$

Maka, jumlah sampel yang diperlukan adalah 237 orang.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

**Tabel 1.** Distribusi Karakteristik Responden

<b>Karakteristik</b>	<b>n</b>	<b>%</b>
<b>Usia</b>		
<30 Tahun	95	40.08
>30 Tahun	142	59.92
<b>Jumlah</b>	<b>237</b>	<b>100.00</b>
<b>Jenis Kelamin</b>		
Laki Laki	118	49.79
Perempuan	119	50.21
<b>Jumlah</b>	<b>237</b>	<b>100.00</b>
<b>Pekerjaan</b>		
Kuli Bangunan	47	19.83
Pedagang	59	24.89
Buruh Harian	47	19.83
Wiraswasta	53	22.36
Lainnya	31	13.08
<b>Jumlah</b>	<b>237</b>	<b>100.00</b>
<b>Pendidikan Terakhir</b>		
SMP	59	24.89
SMA	118	49.79
Diploma	35	14.77
S1	25	10.55
<b>Jumlah</b>	<b>237</b>	<b>100.00</b>
<b>Status</b>		
Belum Menikah	71	29.96
Sudah Menikah	166	70.04
<b>Jumlah</b>	<b>237</b>	<b>100.00</b>
<b>Penghasilan</b>		
<UMR	142	59.92
>UMR	95	40.08
<b>Jumlah</b>	<b>237</b>	<b>100.00</b>
<b>Pengeluaran perbulan</b>		
<1.500.000,00	142	59.92
>1.500.000,00	95	40.08
<b>Jumlah</b>	<b>237</b>	<b>100.00</b>

<b>Aset Keluarga</b>		
Motor	178	75.11
Sawah	24	10.13
Rumah Pribadi	35	14.77
<b>Jumlah</b>	<b>237</b>	<b>100.00</b>

Berdasarkan tabel diatas, data yang diperoleh adalah Mayoritas responden BPJS Non PBI di Kecamatan Batang Kuis berusia di atas 30 tahun (59,92%) dan terdiri dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang hampir seimbang (49,79% dan 50,21%). Responden memiliki beragam pekerjaan, dengan pedagang (24,89%) dan wiraswasta (22,36%) sebagai kelompok terbesar, serta latar belakang pendidikan didominasi oleh lulusan SMA (49,79%). Sebagian besar responden sudah menikah (70,04%) dan memiliki penghasilan serta pengeluaran bulanan di bawah Upah Minimum Regional dan Rp 1.500.000 (masing-masing 59,92%). Dari sisi aset, mayoritas memiliki motor (75,11%), sementara kepemilikan sawah dan rumah pribadi masing-masing relatif kecil, menunjukkan kondisi ekonomi yang beragam namun cenderung sederhana dengan potensi kemampuan membayar iuran yang dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi tersebut.

Karakteristik responden menunjukkan bahwa peserta BPJS Non PBI di Kecamatan Batang Kuis mayoritas adalah kelompok usia produktif dengan latar belakang pekerjaan yang beragam dan tingkat pendidikan menengah ke bawah. Sebagian besar memiliki penghasilan dan pengeluaran yang relatif rendah serta status pernikahan sudah menikah, yang berpotensi mempengaruhi kemampuan (ability to pay) dan kesediaan (willingness to pay) dalam membayar iuran BPJS. Kepemilikan aset yang cukup baik, terutama motor, dapat menjadi indikator tambahan dalam menilai kemampuan ekonomi peserta.

### Analisis Univariat

**Tabel 2.** Distribusi Tingkat Ability to Pay (ATP) Peserta BPJS Non PBI

<b>ATP</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
Mampu	110	46,4
Tidak Mampu	127	53,6
<b>Total</b>	<b>237</b>	<b>100</b>

Dari tabel 2, terlihat bahwa hampir setengah dari responden (46,4%) termasuk dalam kategori "Mampu" secara finansial untuk membayar iuran BPJS. Sebaliknya, terlihat bahwa lebih dari setengah responden (53,6) termasuk dalam kategori "Tidak

Mampu” secara finansial untuk membayar iuran BPJS dan menunjukkan bahwa faktor selain kemampuan finansial juga memengaruhi keputusan membayar.

Di sisi lain, lebih dari separuh responden (53,6%) tergolong "Tidak Mampu" secara ekonomi. Temuan ini menegaskan pentingnya intervensi kebijakan seperti subsidi atau program bantuan untuk meningkatkan kepatuhan membayar iuran, khususnya bagi peserta yang secara ekonomi kurang mampu, agar tujuan jaminan kesehatan nasional dapat tercapai secara efektif. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa kemampuan membayar (Ability to Pay) merupakan faktor penting dalam menentukan kepatuhan peserta BPJS dalam membayar iuran. Peserta dengan ATP tinggi cenderung lebih patuh karena memiliki sumber daya ekonomi yang cukup. Namun, adanya kelompok peserta dengan ATP rendah menunjukkan perlunya intervensi atau kebijakan subsidi agar peserta yang kurang mampu tetap dapat mengikuti program BPJS tanpa mengalami beban finansial yang berat (Marzuki et al., 2019)

Selain itu, variasi kemampuan membayar ini juga berpengaruh pada kemauan membayar (Willingness to Pay), di mana peserta dengan ATP tinggi biasanya memiliki WTP yang lebih tinggi pula, sehingga kepatuhan membayar iuran menjadi lebih baik. Oleh karena itu, pengelola BPJS dan pemerintah perlu mempertimbangkan faktor ATP dalam merancang strategi pembayaran iuran, seperti penyesuaian tarif atau pemberian insentif bagi peserta dengan kemampuan ekonomi terbatas (Sihaloho, 2019).

**Tabel 3.** Distribusi Tingkat Willingness to Pay (WTP) Peserta BPJS Non PBI

<b>WTP</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
Bersedia	150	63,3
Tidak Bersedia	87	36,7
<b>Total</b>	<b>237</b>	<b>100</b>

Berdasarkan tabel 3 terlihat bahwa mayoritas peserta BPJS Non PBI (63,3%) memiliki tingkat kemauan membayar (WTP) yang positif. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar peserta menyadari pentingnya membayar iuran BPJS dan memiliki niat yang kuat untuk memenuhi kewajiban tersebut. Sebaliknya, sekitar 36,7% peserta menunjukkan ketidakbersediaan membayar, walaupun mau membayar, mungkin menghadapi kendala lain.

Selain itu, terdapat perbedaan signifikan antara kelompok yang "Mau" dan "Tidak Mau" membayar iuran dalam hal tingkat kemauan membayar. Peserta yang tidak bersedia membayar iuran cenderung lebih banyak berada dalam kelompok "Tidak Mau", yang dapat menjadi indikator risiko rendahnya kepatuhan pembayaran iuran. Temuan ini

menegaskan pentingnya upaya edukasi dan intervensi kebijakan untuk meningkatkan kesadaran dan kemauan membayar peserta, sehingga kepatuhan membayar iuran BPJS Non PBI dapat meningkat secara signifikan.

Hasil ini mengindikasikan bahwa mayoritas peserta memiliki kemauan yang kuat untuk membayar iuran BPJS, yang merupakan faktor penting dalam mendukung keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional. Tingginya WTP ini dapat dipengaruhi oleh kesadaran peserta akan manfaat perlindungan kesehatan yang diberikan oleh BPJS, serta pengalaman pribadi atau keluarga yang memerlukan layanan kesehatan. Namun, adanya kelompok dengan WTP rendah menunjukkan bahwa masih terdapat hambatan psikologis, ekonomi, atau kurangnya pemahaman tentang pentingnya pembayaran iuran secara rutin. Faktor-faktor seperti kondisi keuangan yang terbatas, persepsi manfaat yang kurang, atau pengalaman negatif dalam pelayanan kesehatan bisa menjadi penyebab rendahnya kemauan membayar (Aryani & Muqorrobin, 2013).

Penelitian lain juga menunjukkan bahwa WTP berhubungan erat dengan kepatuhan membayar iuran BPJS, bahkan kadang lebih dominan dibandingkan dengan Ability to Pay. Oleh karena itu, upaya peningkatan WTP melalui edukasi, sosialisasi manfaat BPJS, serta perbaikan kualitas layanan kesehatan perlu dilakukan agar kepatuhan peserta meningkat dan program BPJS dapat berjalan efektif.

#### **Analisis Bivariat**

**Tabel 4.** Hubungan Ability to Pay (ATP) dengan Kepatuhan Membayar Iuran

ATP	Kepatuhan Membayar Iuran						
	Mau		Tidak Mau		Total		<i>p value</i>
	n	%	n	%	n	%	
Patuh	120	50.6	15	6.3	135	56.9	<b>0.001</b>
Tidak Patuh	20	12.7	72	30.4	102	23.1	
<b>Total</b>	<b>150</b>	<b>63.3</b>	<b>87</b>	<b>36.7</b>	<b>237</b>	<b>100</b>	

Berdasarkan tabel 4 terdapat, dari total 237 responden, sebanyak 135 orang (56,9%) menunjukkan kepatuhan membayar iuran BPJS, dengan mayoritas di antaranya (120 orang atau 50,6%) juga menyatakan kepatuhan membayar (ATP) yang tinggi. Sebaliknya, kelompok yang tidak patuh membayar iuran berjumlah 102 responden (43,1%), dimana sebagian besar (72 orang atau 30,4%) juga tidak mau membayar iuran, menunjukkan adanya korelasi kuat antara WTP dan kepatuhan membayar iuran. Nilai p sebesar 0,001 mengindikasikan hubungan yang signifikan secara statistik antara tingkat kepatuhan membayar iuran BPJS Non PBI di Kecamatan Batang Kuis.

Temuan ini mengonfirmasi bahwa kemampuan ekonomi peserta BPJS Non PBI sangat memengaruhi kepatuhan mereka dalam membayar iuran. Peserta yang merasa mampu secara finansial lebih konsisten dalam memenuhi kewajiban pembayaran iuran tanpa hambatan berarti. Sebaliknya, peserta dengan kemampuan membayar rendah menghadapi kesulitan finansial yang berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan (Rusydi; Arni Rizqiani et al., 2022).

Hal ini sesuai dengan teori Anderson yang menyatakan bahwa seseorang tidak akan bertindak meskipun memiliki niat jika tidak mampu secara ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan yang mempertimbangkan kemampuan ekonomi peserta, seperti penyesuaian tarif atau subsidi bagi yang kurang mampu, sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran iuran. Penelitian ini juga sejalan dengan studi sebelumnya yang menemukan hubungan signifikan antara ATP dan kepatuhan membayar iuran BPJS, serta menegaskan bahwa faktor ekonomi merupakan kunci dalam keberhasilan program jaminan kesehatan nasional (Rahmatillah\*, Surna Lastri, 2025).

**Tabel 5.** Hubungan Willingness to Pay (WTP) dengan Kepatuhan Membayar Iuran

WTP	Kepatuhan Membayar Iuran						
	Mau		Tidak Mau		Total		<i>p value</i>
	n	%	n	%	n	%	
Patuh	110	46.4	20	8.4	130	54.9	<b>0.001</b>
Tidak Patuh	40	16.9	67	28.3	107	45.1	
<b>Total</b>	<b>150</b>	<b>43.3</b>	<b>87</b>	<b>36.7</b>	<b>237</b>	<b>100</b>	

Berdasarkan tabel 5 dihasilkan dari total 237 responden, 130 orang (54,9%) menunjukkan kepatuhan membayar iuran BPJS, dengan mayoritas dari mereka (110 orang atau 46,4%) juga menyatakan kemauan membayar (WTP) yang tinggi. Sebaliknya, 107 responden (45,1%) tidak patuh membayar iuran, dimana sebagian besar (67 orang atau 28,3%) juga tidak mau membayar iuran.

Mengindikasikan hubungan yang sangat signifikan antara tingkat kemauan membayar dan kepatuhan membayar iuran BPJS Non PBI di Kecamatan Batang Kuis. Hasil ini menegaskan bahwa kemauan membayar (WTP) merupakan faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan peserta BPJS Non PBI dalam membayar iuran. Peserta yang memiliki kemauan tinggi cenderung lebih disiplin dan konsisten dalam memenuhi kewajiban pembayaran, meskipun kemampuan membayar (Ability to Pay) tidak selalu tinggi. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa WTP lebih dominan dibanding ATP dalam menentukan kepatuhan peserta BPJS.

Faktor-faktor yang mempengaruhi WTP antara lain persepsi terhadap manfaat BPJS, pengalaman menggunakan layanan kesehatan, dan motivasi personal. Oleh karena itu, selain memperhatikan kemampuan ekonomi peserta, BPJS perlu meningkatkan edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan kemauan membayar iuran. Penelitian ini juga mendukung teori WHO yang menyatakan bahwa sikap dan kemauan individu sangat berperan dalam kepatuhan terhadap program jaminan kesehatan. Dengan demikian, strategi peningkatan kepatuhan harus melibatkan pendekatan psikososial dan komunikasi yang efektif agar peserta merasa termotivasi untuk membayar iuran tepat waktu (Utami et al., 2024).

**Tabel 6.** Analisis Multivariat Faktor Determinan Kepatuhan Membayar Iuran

Variabel	p-value	Exp (B)	Keterangan
Ability to Pay (ATP)	0.001	0.060	Berpengaruh signifikan
Willingness to Pay (WTP)	0.001	0.015	Faktor dominan berpengaruh signifikan

Berdasarkan tabel 6 hasil analisis regresi logistik menunjukkan bahwa baik Ability to Pay (ATP) maupun Willingness to Pay (WTP) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar iuran BPJS Non PBI, dengan nilai p-value masing-masing 0,001 dan 0,001 ( $p < 0,05$ ). Nilai Exp(B) yang lebih kecil pada WTP (0,015) dibandingkan ATP (0,060) mengindikasikan bahwa WTP merupakan faktor yang lebih dominan dalam menentukan kepatuhan peserta.

Temuan ini mengonfirmasi bahwa selain kemampuan ekonomi (ATP), kemauan membayar (WTP) memiliki peran yang sangat penting dalam mempengaruhi kepatuhan peserta BPJS Non PBI membayar iuran. Peserta yang memiliki kemauan tinggi untuk membayar iuran cenderung lebih patuh, meskipun kemampuan ekonominya mungkin terbatas. Sebaliknya, peserta yang meskipun mampu secara ekonomi tetapi tidak memiliki kemauan membayar, cenderung tidak patuh (Rosdiana et al., 2025).

Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa faktor psikologis seperti sikap dan motivasi (WTP) seringkali lebih menentukan perilaku kepatuhan dibandingkan faktor ekonomi murni (ATP). Oleh karena itu, strategi peningkatan kepatuhan sebaiknya tidak hanya fokus pada aspek kemampuan finansial, tetapi juga pada upaya meningkatkan kesadaran, edukasi, dan motivasi peserta melalui sosialisasi manfaat BPJS dan perbaikan kualitas layanan (Dewiyani & Fadila, 2022).

Dengan memahami faktor dominan ini, BPJS dan pihak terkait dapat merancang program yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan peserta, misalnya dengan

pendekatan komunikasi persuasif dan pemberian insentif bagi peserta yang patuh.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai hubungan Ability to Pay (ATP) dan Willingness to Pay (WTP) dengan kepatuhan membayar iuran peserta BPJS Non PBI di Kecamatan Batang Kuis, dapat disimpulkan bahwa kedua faktor tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan peserta. Peserta yang memiliki kemampuan membayar (ATP) yang baik cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pembayaran iuran BPJS, karena mereka secara ekonomi mampu menyediakan dana yang diperlukan. Selain itu, kemauan membayar (WTP) bahkan menunjukkan pengaruh yang lebih dominan dibandingkan kemampuan membayar, dimana peserta yang memiliki motivasi dan kesadaran tinggi terhadap pentingnya iuran BPJS lebih konsisten dalam melakukan pembayaran tepat waktu. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa faktor sosial ekonomi, pengalaman menggunakan layanan kesehatan, dan persepsi manfaat BPJS sangat memengaruhi ATP dan WTP peserta mandiri.

Lebih lanjut, hasil penelitian ini menegaskan bahwa strategi peningkatan kepatuhan peserta BPJS Non PBI harus mempertimbangkan kedua aspek tersebut secara simultan. Tidak hanya memperhatikan kemampuan ekonomi peserta melalui penyesuaian tarif atau subsidi, tetapi juga meningkatkan kesadaran dan kemauan membayar melalui edukasi, sosialisasi manfaat program, serta peningkatan kualitas layanan kesehatan. Pendekatan holistik ini penting agar peserta yang secara ekonomi mampu sekaligus memiliki kemauan tinggi dapat terus mempertahankan kepatuhan, sementara peserta yang kurang mampu dapat dibantu agar tidak mengalami kesulitan dalam pembayaran iuran. Dengan demikian, keberlanjutan program JKN dan pencapaian cakupan kesehatan semesta dapat lebih terjamin.

#### REFERENSI

- Aisah, S. A. S. (2022). Hubungan antara persepsi, pendapatan, dan jarak tempuh menuju tempat pembayaran dengan kepatuhan membayar iuran segmen peserta bukan penerima upah (PBPU) di RS X Kab Bogor tahun 2021: The relationship between perception, income, and mileage towards the place of payment with compliance in paying contributions for the non-wage recipient participant segment (NWRP) at Hospital X Bogor Regency in 2021. *Indonesian Scholar Journal of Medical and Health Science*, 1(08), 268–276.

- Aryani, M. A., & Muqorrobin, M. (2013). Determinan willingness to pay (WTP) iuran peserta BPJS Kesehatan. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 14(April). <http://journal.umy.ac.id/index.php/esp/article/view/1245>
- Dewiyani, A. C., & Fadila, R. (2022). Faktor determinan kepatuhan membayar iuran JKN pada peserta mandiri di Kota Malang. *Jurnal Informasi Kesehatan Indonesia*, 8(1), 1–10.
- Hardika, C. P., & Purwanti, E. Y. (2020). Analisis willingness to pay terhadap iuran BPJS Kesehatan pada pekerja sektor informal di Kota Semarang. *Diponegoro Journal of Economics*, 9(3), 131–143. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jme>
- Iqbal, M., Yeni, R., Kusumastuti, I., Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat, P., & Ilmu Kesehatan, F. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar (willingness to pay) iuran program Jaminan Kesehatan Nasional pada pekerja sektor informal di Kota Jakarta Timur tahun 2023. *Jurnal Kesehatan*, 3(3), 87–96.
- Kasim, M., Nurdin, M., Manajemen, M., Ekonomi, F., & Hasanuddin, U. (2023). Analisis willingness to pay dan ability to pay iuran BPJS Kesehatan: Literatur review. *Economics and Digital Business Review*, 4(2), 216–222. <https://ojs.stieamkop.ac.id/index.php/ecotal/article/view/705>
- Khumairah, L., Herawati, P., Auzi, S., & Gurning, F. P. (2024). Analisis faktor yang berhubungan dengan ATP dan WTP peserta mandiri dalam membayar iuran BPJS kelas III pada pedagang di Kelurahan Tuntungan II. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 7(2), 85–95.
- Kusuma, A. R. (2016). *Analisis kemampuan dan kemauan membayar iuran pasien PBPJ U Jaminan Kesehatan Nasional di RSUD Sufina Aziz Medan* (Skripsi). Tidak diterbitkan.
- Marzuki, D. S., Abadi, M. Y., Darmawansyah, D., Arifin, M. A., Rahmadani, S., & Fajrin, M. A. (2019). Analisis kemampuan membayar dan kemauan membayar peserta PBPJ U yang menunggak iuran JKN di Kecamatan Tamalate Kota Makassar. *Jurnal Manajemen Kesehatan Yayasan RS. Dr. Soetomo*, 5(2), 102. <https://doi.org/10.29241/jmk.v5i2.158>
- Murpratiwi, O., Nugroho, T. B., & Sujoko. (2022). Analisis kemudahan melakukan pembayaran, ability to pay dan kepatuhan pembayaran iuran peserta mandiri Jaminan Kesehatan Nasional: Studi pada peserta mandiri BPJS Kesehatan Kantor Cabang Magelang (2020). *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, 1(4), 230–257. <https://doi.org/10.58192/ebismen.v1i4.161>
- Noerjoedianto, D. (2016). Kajian ability to pay (ATP) bagi calon peserta BPJS Kesehatan dalam pemilihan besaran iuran di Propinsi Jambi tahun 2015. *Jambi Medical Journal*, 4(2), 156–171. <https://online-journal.unja.ac.id/kedokteran/article/view/3580>
- Rahmatillah, S., & Surna Lastri, H. H. (2025). [Judul artikel tidak lengkap]. *Jurnal*, 8(1), 53–65.
- Rosdiana, H., Nurmawaty, D., & [Penulis lainnya]. (2025). Faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan membayar iuran BPJS Kesehatan oleh peserta mandiri pada unit

rawat jalan Puskesmas Kecamatan. *Sehat Rakyat: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 4(1), 56–65. <https://doi.org/10.54259/sehatrakyat.v4i1.4111>

Rusydi, R., Rizqiani, A., Nurgahayu, N., & Masri, N. F. (2022). Faktor yang berhubungan dengan ATP dan WTP dalam membayar iuran BPJS Kesehatan mandiri. *Window of Public Health Journal*, 3(4), 750–760.

Sihaloho, E. N. (2019). *Determinan kemauan membayar iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional mandiri di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Semarang* (Skripsi). Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang. <http://lib.unnes.ac.id>

Utami, N. J., Karyus, A., & Pramudho, K. (2024). Kepatuhan peserta PBPU dalam membayar iuran BPJS Kesehatan di Kabupaten Mesuji. *JIK: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 8(1), 10. <https://doi.org/10.33757/jik.v8i1.760>